ABSTRAK

Moh. Subhan Alqodiri, 126102201020, Perlindungan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat dalam Putusan Verstek Ditinjau dalam Perspektif CEDAW (Studi pada Pengadilan Agama Jombang), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatulah Tulungagung, 2024, Pembimbing Dr. Rohmawati, M.A.

Kata kunci: Perlindungan Hak Perempuan, Cerai Gugat, Putusan Verstek, Perspektif CEDAW

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya putusan hakim di Pengadilan Agama Jombang keputusan hakim di Pengadilan Agama Jombang yang mengabulkan gugatan cerai secara verstek oleh seorang perempuan, namun tanpa menetapkan hak nafkah istri setelah perceraian. Padahal secara hukum, perceraian bukan menjadi sebab terputusnya hak nafkah bagi istri pasca perceraian. Jika putusan verstek menjadi sebab terputusnya hak nafkah pasca cerai gugat maka hal ini dikhawatirkan akan menjadi suatu kekosongan hukum dan celah bagi suami agar terhindar dari kewajiban pemenuhan hak nafkah. Oleh karena itu peneliti mendeskripsikan tentang implementasi Pengadilan Agama Jombang dalam upaya perlindungan hak nafkah perempuan pasca cerai gugat dalam putusan verstek dan menganalisis implementasi tersebut dengan menggunakan perspektif CEDAW.

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi perlindungan hak perempuan pasca cerai gugat dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Jombang?, 2) Bagaimana perlindungan hak perempuan pasca cerai gugat dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Jombang ditinjau dengan perspektif CEDAW?.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan implementasi perlindungan hak perempuan pasca cerai gugat dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Jombang. 2) Untuk menganalisis perlindungan hak perempuan pasca cerai gugat dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Jombang ditinjau dengan perspektif CEDAW.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Empiris dengan melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Teknik analisis data yang dilakukan adalah data yang digunakan adalah kondensasi data (*Condensation Data*), penyajian data (*Display Data*), verifikasi dan konklusi data (penarikan kesimpulan), serta pengecekan keabsahan data yang menggunakan bahan referensi dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Terdapat pelaksanaan perlindungan hak-hak perempuan di bidang hak-hak perempuan di Pengadilan Agama

Jombang. Hal ini dikonfirmasi dengan adanya putusan yang menyediakan penetapan penyelesaian sengketa atas perkara tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa keterbatasan dan kompleksitas dalam proses penetapan nafkah perempuan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: *Pertama*, Penggugat tidak mencantumkan tuntutan hak nafkah dalam posita dan petitum gugatan. Hal ini disebabkan oleh pemahaman mereka yang terbatas mengenai aturan yang hanya dapat mereka ikuti sebagian. *Kedua*, Lemahnya bukti yang diajukan menjadi hambatan utama sehingga mereka tidak dapat mengajukan klaim tersebut selama di pengadilan. Selama pelaksanaannya, hakim juga mempertimbangkan beberapa faktor seperti kekuatan ekonomi suami dan kebutuhan individu istri dalam menetapkan hak serta memberikan jaminan atas hak tersebut setelah besaran nafkah diberlakukan pasca perceraian. 2). Implementasi perlindungan hak perempuan pasca cerai gugat dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Jombang, ketika ditinjau dalam perspektif CEDAW, masih menghadapi beberapa tantangan. Meskipun CEDAW memberikan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi hak-hak perempuan dan menghapuskan diskriminasi, terdapat kesenjangan antara prinsip-prinsip kesetaraan gender CEDAW dan implementasinya di lapangan. Ketidaksesuaian antara hukum dan praktik di pengadilan agama terkait perlindungan hak nafkah pasca perceraian, seperti perbedaan redaksi dan kedudukan regulasi, respon hakim, dan akses perempuan antara cerai gugat dan cerai talak, menghambat pemenuhan hak nafkah perempuan dan berpengaruh pada kemanfaatan hukum. Selain itu, praktik-praktik diskriminatif, baik secara de jure maupun de facto, menunjukkan ketidaksetaraan dalam sistem peradilan. Meskipun ada langkah-langkah untuk menyelaraskan peraturan dengan prinsip-prinsip CEDAW, tantangan dalam implementasi masih terjadi, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan kesetaraan gender dalam ruang hukum.

ABSTRACT

Moh. Subhan Alqodiri, 126102201020, Protection of Women's Rights After Divorce in Lawsuit Verstek Decisions Viewed from the CEDAW Perspective (Study at the Jombang Religious Court), Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Legal Sciences, Sayyid Ali Rahmatulah State Islamic University Tulungagung, 2024, Supervisor Dr . Rohmawati, M.A.

Keywords: Protection of Women's Rights, Divorce Lawsuit, Verstek Decision, CEDAW Perspective

This research was motivated by the judge's decision at the Jombang Religious Court which granted the woman's legal divorce suit but was not accompanied by a determination regarding the fulfillment of the wife's maintenance rights after the divorce. In fact, legally, divorce is not a cause for termination of a wife's maintenance rights after a divorce. If the verstek decision is the reason for the cessation of maintenance rights after a contested divorce, it is feared that this will create a legal vacuum and a loophole for husbands to avoid the obligation to fulfill maintenance rights. Therefore, the researcher describes the implementation of the Jombang Religious Court in efforts to protect women's livelihood rights after divorce in the verstek decision and analyzes this implementation using the CEDAW perspective.

The formulation of the problem in this research is 1) How is the implementation of the protection of women's rights after a lawsuit divorce in the verstek decision at the Jombang Religious Court?, 2) How is the protection of women's rights after a lawsuit divorce in the verstek decision at the Jombang Religious Court reviewed from the CEDAW perspective?

The objectives of this research are 1) To describe the implementation of the protection of women's rights after divorce in the verstek decision at the Jombang Religious Court. 2) To analyze the protection of women's rights after divorce in the verstek decision at the Jombang Religious Court from a CEDAW perspective.

This research uses a type of empirical juridical research where researchers go directly into the field to collect data. The data collection techniques used were interviews, documentation and literature. The data analysis technique used is data condensation (*Condensation Data*), data presentation (*Display Data*), data verification and conclusion (drawing conclusions), as well as checking the validity of the data using reference materials and source triangulation.

The results of this research are 1) There is an implementation of the protection of women's rights after divorce in the verstek decision at the Jombang Religious Court. This is proven by the decision granting the granting of maintenance rights after the divorce case. However, in its implementation there are still obstacles and complexities in efforts to fulfill women's livelihood rights caused by several factors, namely*First*The plaintiff does not claim maintenance rights in the posita and petitum of the lawsuit. This is due to the plaintiff's lack of knowledge of the rights they should get after divorce.*Second* The weakness of the evidence presented is the main obstacle so that it cannot strengthen the lawsuit's claims in court. In its implementation, the judge also takes into consideration when determining maintenance rights such as considering the husband's economic capacity and the wife's basic living needs while providing a guarantee of fulfillment of rights after deciding on the amount of maintenance after divorce. 2). The implementation of the protection of women's rights after divorce in the verstek decision at the Jombang Religious Court, when viewed from a CEDAW perspective, still faces several challenges. Although CEDAW provides a strong framework for protecting women's rights and eliminating discrimination, there is a gap between CEDAW's gender equality principles and their implementation on the ground. Inconsistencies between law and practice in religious courts regarding the protection of post-divorce livelihood rights, such as differences in editorial and regulatory positions, judges' responses, and women's access between contested divorce and talak divorce, hinder the fulfillment of women's maintenance rights and affect the usefulness of the law. In addition, discriminatory practices, both de jure and de facto, demonstrate inequality in the justice system. Although there have been steps to align regulations with CEDAW principles, challenges in implementation remain, so further efforts are needed to ensure gender equality in the legal space.

ملخص

محمد سبحان القديري، ١٢٦١٠٢٢٠١٠٢٠، حماية حقوق المرأة في دعاوى ما بعد الطلاق في قرارات فيرستيك من منظور اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (دراسات في محاكم جومبانج الدينية)، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة والعلوم القانونية، جامعة السيد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية تولونج أجونج. ، ٢٠٢٤، المشرف د. رحماواتي، م.أ

الكلمات المفتاحية: حماية حقوق المرأة، دعوى الطلاق، قرار فيرستيك، منظور اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

كان الدافع وراء هذا البحث هو قرار القاضي في محكمة جومبانج الدينية الذي منح المرأة دعوى الطلاق القانوني ولكن لم يكن مصحوبًا بقرار بشأن استيفاء حقوق الزوجة في النفقة بعد الطلاق. وفي الواقع، فإن الطلاق من الناحية القانونية لا يشكل سبباً لإنهاء حقوق الزوجة في النفقة بعد الطلاق. وإذا كان قرار الفرستك هو السبب في سقوط حقوق النفقة بعد الطلاق المطعون فيه، فيخشى أن يخلق ذلك فراغا قانونيا وثغرة أمام الأزواج للتهرب من الالتزام باستيفاء حقوق النفقة. لذلك، يصف الباحث تنفيذ محكمة جومبانج الدينية في الجهود المبذولة لحماية حقوق المرأة في سبل العيش بعد الطلاق في قرار فيرستيك ويحلل هذا التنفيذ باستخدام منظور اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وصياغة المشكلة في هذا البحث هي ١) كيف يتم تنفيذ حماية حقوق المرأة بعد دعوى الطلاق في قرار فيرستيك في المحكمة الدينية جومبانج؟، ٢) كيف يتم حماية حقوق المرأة بعد دعوى الطلاق في هل تمت مراجعة قرار فيرستيك الصادر عن محكمة جومبانج الدينية من منظور اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟

أهداف هذا البحث هي ١) وصف تنفيذ حماية حقوق المرأة بعد الطلاق في قرار فيرستيك في محكمة جومبانج الدينية. ٢) تحليل حماية حقوق المرأة بعد الطلاق في قرار فيرستيك الصادر عن محكمة جومبانج الدينية من منظور اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

يستخدم هذا البحث نوعًا من البحث القانوني التجريبي حيث يذهب الباحثون مباشرة إلى الميدان لجمع البيانات. وكانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والوثائق والأدب. تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي تكثيف البيانات) *بيانات التكثيف*(، عرض بيانات) *عرض البيانات* (والتحقق من البيانات واستنتاجها (استخلاص النتائج)، وكذلك التحقق من صحة البيانات باستخدام المواد المرجعية وتثليث المصدر.

نتائج هذا البحث هي ١) هناك تنفيذ لحماية حقوق المرأة بعد الطلاق في قرار فيرستيك في محكمة جومبانج الدينية. ويثبت ذلك قرار منح حقوق النفقة بعد قضية الطلاق. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات وتعقيدات في الجهود الرامية إلى إعمال حقوق المرأة في كسب العيش بسبب عدة عوامل، وهي:*أولاً* ولا يطالب المدعي بحقوق النفقة في موضوع الدعوى وموضوعها. وذلك لعدم معرفة المدعية بالحقوق التي يجب أن تحصل عليها بعد الطلاق.*ثانية* ويشكل ضعف الأدلة المقدمة العائق الرئيسي بحيث لا يتمكن من تعزيز ادعاءات الدعوى في المحكمة. كما يراعي القاضي في تنفيذه عند تحديد حقوق النفقة مثل مراعاة القدرة الاقتصادية للزوج والاحتياجات المعيشية الأساسية للزوجة مع توفير ضمان استيفاء الحقوق بعد تحديد مقدار النفقة بعد الطلاق. ٢). ولا يزال تنفيذ حماية حقوق المرأة بعد الطلاق في قرار فيرستيك الصادر عن محكمة جومبانج الدينية، عند النظر إليه من منظور اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يواجه عدة تحديات. على الرغم من أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة توفر إطارًا قويًا لحماية حقوق المرأة والقضاء على التمييز، إلا أن هناك فجوة بين مبادئ المساواة بين الجنسين في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتنفيذها على أرض الواقع. إن التناقضات بين القانون والممارسة في المحاكم الدينية فيما يتعلق بحماية حقوق سبل العيش بعد الطلاق، مثل الاختلافات في المناصب التحريرية والتنظيمية، واستجابات القضاة، وإمكانية وصول المرأة بين الطلاق المتنازع عليه والطلاق الطلاق، تعيق الوفاء بحقوق المرأة في النفقة وتؤثر على فائدة

القانون. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الممارسات التمييزية، سواء بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع، تظهر عدم المساواة في نظام العدالة. على الرغم من وجود خطوات لمواءمة الأنظمة مع مبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلا أن التحديات في التنفيذ لا تزال قائمة، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان المساواة بين الجنسين في المجال القانوني.